

SKRIPSI

PERAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DALAM MEMBATASI PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI KABUPATEN SUMEDANG

Disusun Oleh :

NAMA : MUHAMAD AKMAL AMRULLAH

NOMOR POKOK : E. 1735223022

PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana (S-1)

STIA Sebelas April Sumedang



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

SEBELAS APRIL SUMEDANG

2021

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PERSETUJUAN

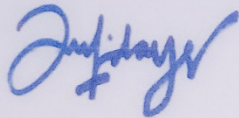
Judul Skripsi:

**PERAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK DALAM MEMBATASI PENYEBARAN BERITA BOHONG
(HOAX) DI KABUPATEN SUMEDANG**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing:

Pembimbing I,



Dr. Anne Friday Safaria. S.,S.,M.,Si
NIDN.0422037402

Pembimbing II,



Hj. Fepi Febianti, S.Sos.,M.I.Kom
NIDN.0410028701

Mengetahui,
Ketua STIA Sebelas April Sumedang



Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si
NIDN. 04-3012-7102

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : MUHAMAD AKMAL AMRULLAH
NPM : E. 1735223022
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL PENELITIAN : PERAN DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK DALAM MEMBATASI
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI
KABUPATEN SUMEDANG

Telah mempertahankan Skripsi ini dihadapan Penguji Skripsi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang

Hari : Rabu
Tanggal : 01 September 2021
Pukul : 08.00 s.d selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua Sidang : Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si (.....)

Sekretaris : Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si (.....)

Pembimbing I : Dr. Anne Friday Safaria, S.S., M.Si (.....)

Pembimbing II : Hj. Fepi Febianti, S.Sos., M.I.Kom (.....)

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMAD AKMAL AMRULLAH
NPM : E. 1735223022
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL PENELITIAN : PERAN DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK DALAM MEMBATASI
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI
KABUPATEN SUMEDANG

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dan koreksi Dosen Penguji pada
Ujian Sidang Skripsi

Hari : Rabu
Tanggal : 01 September 2021
Waktu : 08.00 s/d selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS

Tim Penguji Skripsi:

Penguji I	: Shofwan Hendryawan, S.Pd., M.Pd	(.....)
Penguji II	: Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si	(.....)
Penguji III	: Hj. Fepi Febianti, S.Sos., M.I.Kom	(.....)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“PERAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DALAM MEMBATASI PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI KABUPATEN SUMEDANG”** ini, sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagian dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Sumedang,
Yang Membuat Pernyataan

MUHAMAD AKMAL AMRULLAH

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) SEBELAS
APRIL SUMEDANG**

ABSTRAK

**PERAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK DALAM MEMBATASI PENYEBARAN BERITA
BOHONG (HOAX) DI KABUPATEN SUMEDANG**

Disusun oleh :

NAMA : MUHAMAD AKMAL AMRULLAH
NOMOR POKOK : 1735223022
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Halaman, Bab, Tabel, Gambar, Lampiran

Daftar Pustaka:

Tujuan penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui Peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Dalam Membatasi Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Kabupaten Sumedang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah dan hasil penelitiannya menekankan pada makna dari pada generalisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta triangulasi (gabungan), teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah dengan menggunakan *purposive sampling*, maka sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 orang yaitu kepala bidang komunikasi, kepala seksi bidang kelembagaan dan informasi, dan staf kelembagaan dan informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Kabupaten Sumedang. Sementara teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu data *reduction*, data *display* dan *Conclusion drawing* atau *verification*.

Peran pemerintah untuk membatasi penyebaran *hoax* sudah mulai dipersiapkan dengan beberapa kebijakan dan pengembangan pegawai untuk bisa beradaptasi dengan era digital saat ini, sehingga mampu memanfaatkan berbagai macam *platform* media sosial untuk mengawasi setiap informasi yang tersebar di masyarakat dan memberikan pelayanan informasi terbuka kepada masyarakat. Faktor-faktor penghambat peran pemerintah dalam membatasi penyebaran *hoax* adalah kurang terjangkaunya informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, baik informasi mengenai kegiatan pemerintahan, edukasi tentang berbagai aturan baru, informasi tentang bahayanya sebuah informasi palsu yang akan menyebabkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Membatasi Penyebaran *Hoax*

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan tepat waktu. Tak lupa shalawat berangkaikan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mempunyai suri tauladan dan membawa umat manusia keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang-benderang dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan judul **“PERAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK DALAM MEMBATASI PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI KABUPATEN SUMEDANG”**, diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada jurusan Administrasi Negara STIA Sebelas April Sumedang.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Ucapan terimakasih ditujukan terutama kepada:

1. Yth. Drs.H. Yuyun Hidayat, Selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Sebelas April Sumedang.
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Sebelas Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.

3. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si. Selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Sebelas Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.
4. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan, M.Pd. Selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Sebelas Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.
5. Yth. Ibu Irma Hermayanti, S.Sos., M.Si. Selaku Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Sebelas Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.
6. Yth. Ibu Dr. Anne Friday Safaria, M.Si. Selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan proposal ini.
7. Yth. Ibu Hj. Fepi Febianti, M.I.Kom. Selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan proposal ini.
8. Yth. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Sebelas Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.
9. Yth. Seluruh Staff Tata Usaha Sekolah Tinggi Sebelas Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.
10. Yth. Bapak DR. Iwa Kuswaeri Selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Kabupaten Sumedang.
11. Seluruh Narasumber penelitian, Khususnya pihak Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Kabupaten Sumedang yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
12. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moril, materil serta doa yang tiada henti untuk keberhasilan penyusunan proposal penelitian ini.

13. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan, Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian, baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan dengan berlipat ganda. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan penulis berharap penelitian ini dapat memberikan bahan masukan bagi para pengambil kebijakan serta sumber kajian-kajian akademis untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya dibidang kajian kebijakan publik pada Ilmu Administrasi Negara, khususnya di STIA Sebelas April Sumedang.

Sumedang, April 2021

Penulis

MUHAMAD AKMAL AMRULLAH
E. 1735223022

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Fokus Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hakikat Administrasi	10
2.1.1 Pengertian Administrasi	10
2.1.2 Unsur-unsur Administrasi	11
2.1.3 Pengertian Administrasi Negara	12
2.1.4 Ciri-Ciri Administrasi Negara	13
2.1.5 Ruang Lingkup Administrasi Negara	14
2.1.6 Kaitan Administrasi Negara Dengan Variabel Penelitian	15
2.2 Hakekat Manajemen Publik	16

2.2.1 Pengertian Manajemen Publik	16
2.2.2 Konsep Manajemen Publik	17
2.2.3 Kebijakan Publik	20
2.3 Peran Pemerintah dalam Membatasi Penyebaran <i>Hoax</i>	23
2.3.1 Pengertian Peran Pemerintah	23
2.3.2 Dimensi Peran Pemerintah	24
2.3.3 Faktor-Faktor Penghambat Peran Pemerintah	28
2.3.4 Upaya Dalam Mengatasi hambatan Peran Pemerintah	31
2.3.5 Penyebaran Berita Hoax.....	33
2.4 Kajian Penelitian Terdahulu.....	34
2.5 Kerangka Pemikiran dan Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	36
2.5.1 Kerangka Pemikiran.....	36
2.5.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	39
3.2 Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian	42
3.2.1 Penentuan Sasaran.....	42
3.2.2 Informan Penelitian.....	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.4 Prosedur Pengolahan dan Analisis Data	44
3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	47
1.1.1 Tugas Pokok, Fungsi Dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Kabupaten Sumedang	47
1.1.2 Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Sumedang	48
1.1.3 Struktur Organisasi dan uraian tugas pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Sumedang	49

1.2 Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Kabupaten Sumedang	55
1.2.1 Keadaan pegawai berdasarkan kelompok umur	55
1.2.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan	56
1.2.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	57
1.3 Peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Dalam Membatasi Penyebaran <i>Hoax</i> Di Kabupaten Sumedang	58
1.3.1 Dimensi Peran Pemerintah Di Bidang Pengaturan	59
1.3.2 Dimensi Peran Pemerintah Di Bidang Pelayanan.....	69
1.3.3 Dimensi Peran Pemerintah Di Bidang Pemberdayaan.....	76
1.4 Faktor-Faktor Yang Menghambat Peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Dalam Memmbatasi Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) di Kabupaten Sumedang	87
1.4.1 Hambatan Pemerintah Di Bidang Pengaturan	88
1.4.2 Hambatan Peran Pemerintah Di Bidang Pelayanan.....	97
1.4.3 Hambatan Pemerintah Di Bidang Pemberdayaan.....	107
1.5 Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan Peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Dalam Membatasi Penyebaran Berita Bohong (<i>hoax</i>) di Kabupaten Sumedang	119
1.5.1 Upaya Mengatasi Hambatan Peran Pemerintah di Bidang Pengaturan.....	119
1.5.2 Upaya Mengatasi Hambatan Peran Pemerintah di Bidang Pelayanan	128
1.5.3 Upaya Mengatasi Hambatan Peran Pemerintah di Bidang Pemberdayaan	138
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	151
5.2 Saran.....	153

DAFTAR PUSTAKA..... 156

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 2.2 Kisi-Kisi Pertanyaan Penelitian	40
Tabel 2.3 Pedoman Observasi	41
Tabel 2.4 Pedoman Dokumentasi	42
Tabel 3.1 Sasaran Penelitian	43
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	47
Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan Penelitian 2020/2021	48
Tabel 4.1 Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Berdasarkan Kelompok Umur	56
Tabel 4.2 Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Berdasarkan Golongan.....	56
Tabel 4.3 Keadaan pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Berdasarkan jenjang pendidikan	57
Tabel 4.4 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 1: Pelaksanaan Kebijakan	61
Tabel 4.5 Trianggulasi Pertanyaan Item No 1: Pelaksanaan Kebijakan	62
Tabel 4.6 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 2: Ketegasan Hukuman Bagi Pelaku Penyebar Hoax.....	65
Tabel 4.7 Trianggulasi pertanyaan Item No 2: Ketegasan Hukuman Bagi Pelaku Penyebar <i>Hoax</i>	66
Tabel 4.8 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 3: Sosialisasi Dari Pemerintah.....	68
Tabel 4.9 Trianggulasi Pertanyaan Item No 3: Sosialisasi Dari Pemerintah	69
Tabel 4.10 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 4: Membentuk <i>Team Monitoring</i>	71
Tabel 4.11 Trianggulasi Pertanyaan Item No 4: Membentuk <i>Team Monitoring</i> ..	72
Tabel 4.12 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 5: Menyediakan	

Layanan Informasi Yang Aktual	75
Tabel 4.13 Triangulasi Pertanyaan Item No 5: Menyediakan Layanan Informasi Yang Aktual	75
Tabel 4.14 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 6: Fasilitas Yang Memadai.....	78
Tabel 4.15 Triangulasi Pertanyaan Item No 6: Fasilitas Yang Memadai	78
Tabel 4.16 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 7: Pengembangan Transformasi Digital	80
Tabel 4.17 Triangulasi Pertanyaan Item No 7: Pengembangan Transformasi Digital.....	81
Tabel 4.18 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 8: SDM Yang Siap Dengan Digitalisasi	83
Tabel 4.19 Triangulasi Pertanyaan Item No 8: SDM yang siap dengan digitalisasi	84
Tabel 4.20 Rekapitulasi Peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Dalam Membatasi Penyebaran Berita Bohong (<i>hoax</i>) di Kabupaten Sumedang.....	85
Tabel 4.21 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 13: Regulasi Tidak Tepat Waktu.....	89
Tabel 4.22 Triangulasi Pertanyaan Item No 9: Regulasi Yang Tidak Tepat Waktu	90
Tabel 4.23 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 10: Memunculkan Polemik Baru.....	92
Tabel 4.24 Triangulasi Pertanyaan Item No 10: Memunculkan Polemik Baru	
Tabel 4.25 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 11: Kebijakan Yang Tidak Tepat Sasaran	93
Tabel 4.26 Triangulasi Pertanyaan Item No 11: Kebijakan Yang Tidak Tepat Sasaran	95

Tabel 4.27 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 12: Server Maintenance.....	96
Tabel 4.28 Trianggulasi Pertanyaan Item No 12: <i>Server Maintenance</i>	98
Tabel 4.29 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 13: Tidak Terjangkau Seluruh Masyarakat	99
Tabel 4.30 Trianggulasi Pertanyaan Item No 13: Tidak Terjangkau Seluruh Masyarakat	101
Tabel 4.31 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 14: Kurangnya Sosialisasi.....	102
Tabel 4.32 Trianggulasi Pertanyaan Item No 14: Kurang Sosialisasi	105
Tabel 4.33 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 15: Kurangnya Pengawasan Oleh Atasan	106
Tabel 4.34 Trianggulasi Pertanyaan Item No 15: Kurangnya Pengawasan Oleh Atasan.....	108
Tabel 4.35 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 16: Belum Adanya Pembinaan Kepegawaian	109
Tabel 4.36 Trianggulasi Pertanyaan Item No 16: Belum Adanya Pembinaan Kepegawaian.....	111
Tabel 4.37 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 17: Kurang Maksimalnya Potensi Pegawai.....	113
Tabel 4.38 Trianggulasi Pertanyaan Item No 17: Kurang Maksimalnya Potensi Pegawai	115
Tabel 4.39 Rekapitulasi Faktor Penghambat Peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Dalam Membatasi Pemnyebaran Berita Bohong (<i>hoax</i>) di Kabupaten Sumedang	116
Tabel 4.40 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 18: Regulasi Yang Tepat Waktu	116
Tabel 4.41 Trianggulasi Pertanyaan Item No 18: Regulasi Yang Tepat Waktu	

Tabel 4.42 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 19: Mudah Dipahami Lapisan Masyarakat	121
Tabel 4.43 Triangulasi Pertanyaan Item No 19: Mudah Dipahami Lapisan Masyarakat	122
Tabel 4.44 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 20: Ketegasan Hukuman Bagi Pelanggar	123
Tabel 4.45 Triangulasi Pertanyaan Item No 20: Ketegasan Hukuman Bagi Pelanggar	125
Tabel 4.46 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 21: Dilakukan Oleh Profesional.....	127
Tabel 4.47 Triangulasi Pertanyaan Item No 21: Dilakukan Oleh Profesional..	128
Tabel 4.48 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 22: memberikan Kemudahan Akses Bagi Masyarakat	130
Tabel 4.49 Triangulasi Pertanyaan Item No 22: Memberikan Kemudahan Akses Bagi Masyarakat.....	131
Tabel 4.51 Triangulasi Pertanyaan Item No 23: Mengadakan Seminar Khusus Bagi Masyarakat.....	133
Tabel 4.52 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 24: Memperketat Pengawasan Oleh Atasan	134
Tabel 4.53 Triangulasi Pertanyaan Item No 24: Memperketat Pengawasan Oleh Atasan.....	134
Tabel 4.54 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 25: Mengadakan Bimtek Bagi Pegawai.....	136
Tabel 4.55 Triangulasi Pertanyaan Item No 25: Mengadakan Bimtek Bagi Pegawai Reduksi Data Hasil Wawancara	137
Tabel 4.56 Reduksi Data Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 26: Mengadakan Seleksi Pegawai.....	139
Tabel 4.57 Triangulasi Pertanyaan Item No 26: Mengadakan Seleksi Pegawai.	140
Tabel 4.58 Rekapitulasi Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Peran Dinas	



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 3.1 Bagan Desain Penelitian.....	41
Gambar 3.2 Komponen Dalam Analisis Data.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Berita Acara Bimbingan

Pedoman

Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi ini ditunjukkan dengan perubahan teknologi dan pengetahuan yang semakin berkembang pesat. Banyak hal yang bisa didapatkan dengan cepat dan instan, salah satunya informasi. Dapat dikatakan bahwa informasi merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Tanpa informasi, manusia tidak akan bisa menempatkan dirinya di lingkungan sosial, sehingga manusia akan tersesat jauh dalam belantara kehidupan.

Informasi bisa didapat oleh manusia melalui sebuah komunikasi dengan manusia lain agar dapat tetap mempertahankan kehidupannya. Ia harus mendapat informasi dari orang lain, dan ia memberikan informasi kepada orang lain. Ia perlu mengetahui kejadian di sekitarnya, di tempatnya tinggal, di kotanya, hingga di negaranya. Dan manusia membutuhkan akses untuk mendapatkan informasi itu.

Dengan semakin berkembangnya kecanggihan teknologi informasi saat ini, manusia dapat dengan mudah mendapatkan informasi melalui media-media yang ada disekitarnya. Dari media cetak seperti koran, hingga media elektronik seperti televisi. Dan selain itu, saat ini telah muncul sebuah media informasi yang berhasil di ciptakan manusia melalui perkembangan teknologi yang dapat diakses melalui jaringan internet. Manusia dapat dengan mudah mendapatkan apa yang

ingin ia tahu, dan dapat dengan mudah pula menyebarkan informasi yang ia tahu kepada orang lain.

Namun, dibalik manfaat yang begitu besar dari perkembangan teknologi informasi bagi manusia. Besar pula ancaman yang keluar dari fenomena ini, salah satunya penyebaran berita bohong (*hoax*) yang tidak terkendali dan sangat berpengaruh bagi kehidupan di lingkungan masyarakat.

Hal ini dapat terjadi karena adanya akses internet yang memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk membuat media sosial sebagai wadah untuk berbagi segala hal kepada orang lain. Dan media sosial itu pun menjadi salah satu alat yang dapat dipergunakan untuk menyebar luaskan *hoax*. Masyarakat secara instan atau mudahnya mendapatkan suatu informasi dari sumber yang tidak jelas di media sosial menjadi pemicu *hoax* semakin tidak terkontrol.

Hoax dapat dipahami sebagai informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya atau identik dengan fitnah atau sejenisnya.

Terlebih, berita bohong atau *hoax* yang menyebar, telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu dari pihak yang menghendaki kerusakan dalam hidup masyarakat.

Beredarnya *hoax* yang menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat, telah dianggap sebagai informasi atau berita yang benar akibat masifnya pemberitaan tanpa sumber yang jelas itu. Sementara, masyarakat juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup, untuk membedakan mana informasi yang diperolehnya benar atau salah. Sebagai contoh sebuah artikel berita A (yang ternyata *hoax*), untuk segelintir masyarakat kita tidak serta mempercayai berita A tersebut.

Dikarenakan analisa pribadi, opini dan klarifikasi sumber berita yang masuk akal. Tetapi, untuk lebih banyak masyarakat kita, justru dengan serta merta mempercayai berita A tersebut bahkan dengan hanya membaca judul beritanya saja, tanpa klarifikasi sumber terlebih dahulu. Yang lebih ironisnya lagi, berita A tersebut kemudian dishare kemana-mana dan dilihat oleh semakin banyak orang. Hal ini tentu saja dapat dengan mudah membentuk persepsi publik tentang suatu topik tertentu melalui isi beritanya.

Dari data terbaru yang dihimpun Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), jumlah *hoax* yang tersebar di Indonesia mencapai 2.024. Jumlah itu terhitung sejak tanggal 1 Januari-16 November 2020. Tersebar melalui *facebook*, *twitter*, hingga *group- group whatsapp*. Virus itu berlangsung menyerang otak hingga mengoyak nalar *insane*. Apa bila terpapar virus ini, orang akan mengalami *skizoprenia* informasi yang berujung luntarnya nurani. Hilang kebijaksanaan akal dan keluhuran budi. Orang cerdas jadi nampak beringas, orang berilmu terjebak saling berseteru, dan orang berbudi di caci-maki. Jempol tangan bergerak tanpa kendali, mengamini setiap info tanpa verifikasi, lalu menyebarkan seolah semua orang harus peduli. Hal demikian bukan saja menghancurkan persahabatan tapi juga memundurkan peradaban.

Begitupun permasalahan *hoax* di Kabupaten Sumedang yang tak kunjung menemukan titik akhir, seperti menjadi momok tersendiri bagi semua lapisan masyarakat yang merasakan langsung dampak dari menyebar luasnya berita palsu atau *hoax* di media sosial. Seperti yang baru-baru ini terjadi pada awal tahun 2021, tepatnya pada tanggal 29 Januari 2021 beredar sebuah informasi yang

menggepalkan masyarakat Sumedang, bahwasannya telah terjadi penusukan yang mengakibatkan satu korban jiwa berinisial RPP (25). Sebuah informasi bohong di media sosial telah beredar luas dikalangan masyarakat jika tragedi penusukan tersebut dilakukan oleh salah satu anggota organisasi motor dipicu adanya balas dendam, buntut dari kejadian penusukan sebelumnya pada tanggal 15 Januari 2021. Namun faktanya, kejadian tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan peristiwa sebelumnya. Dikonfirmasi oleh Kapolsek Tanjungsari, Kompol Ahmad Nurzaman, mengatakan :

“Pelaku menyerahkan diri ke Mapolsek Tanjungsari setelah dilakukan pendekatan oleh Kanit Reskrim Polsek Tanjungsari, setelah melakukan penusukan terhadap pria asal Dusun Lebak Jati, Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan itu. Dan pelaku sudah digelandang ke Mapolres Sumedang. Motif penusukan ini, karena pelaku merasa kesal permintaan maafnya tidak diterima oleh korban.”

Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku pembuat dan penyebar hoaks bisa diseret ke meja hijau. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan pasal 45 ayat (2) undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”

Selain itu, dalam Peraturan Bupati Sumedang no 17 tahun 2017 bab 3 pasal 10 ayat (3), pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo Sanditik), sangatlah berperan penting dalam pengawasan suatu informasi yang beredar di media sosial agar

masyarakat dapat semakin terhindar dari *hoax* yang akan mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat. Dibutuhkan ketegasan dan konsistensi untuk dapat memberikan hasil yang maksimal. Namun, meskipun pencegahan *hoax* terus gencar dilakukan, tidak menjadi jaminan *hoax* akan lenyap dari peredaran di media kita. Sehingga, mau tidak mau kuncinya adalah para pribadi para konsumen informasi untuk selektif dan tidak mudah menelan informasi mentah-mentah, juga peran aktif dari pemerintah agar penyebaran *hoax* ini semakin mudah dikendalikan.

Untuk mewujudkan harapan tersebut perlu adanya integrasi antara masyarakat serta peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan terutama dalam menjalankan otonomi daerah dimana peran pemerintah berarti sebagai pelayan publik dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga demi kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dapat dilakukan oleh unsur pemerintah daerah salah satunya pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan menjadi kritis terhadap penggunaan teknologi yang semakin berkembang pesat ini.

Karena sejatinya, peran pemerintah sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan sangat mempengaruhi kemana arah kehidupan yang akan dijalani oleh masyarakat, maka

dari itu seperti halnya penyebaran berita *hoax* yang akan berpengaruh melalui setia tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Pengendalian berita palsu menjadi tantangan bagi lembaga pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam memperoleh informasi terpercaya.

Akan tetapi pada kenyataannya, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang sebagai pihak yang ada di garda terdepan dalam membatasi penyebaran *hoax* di media sosial ini masih belum maksimal dalam menjalankan perannya.

Berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa indikasi yang berkaitan dengan kurang adanya peran pemerintah dalam membatasi penyebaran *hoax*, diantaranya sebagai berikut :

1. Masih kurangnya ketegasan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam memberikan aturan terkait berita yang disebar oleh masyarakat di media sosial. Hal ini terbukti dengan tidak adanya konsistensi dalam menindak para pelaku penyebar *hoax* di media sosial.
2. Masih kurangnya pelayanan dalam bentuk keterbukaan informasi di media sosial yang diberikan kepada masyarakat oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang. Hal ini terbukti dengan belum maksimalnya pemanfaatan media sosial seperti *facebook* oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang.

3. Masih kurangnya pemberdayaan pegawai yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang. Hal ini terbukti dengan belum maksimalnya kinerja *team moonitoring* dalam membatasi penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kabupaten Sumedang.

Dari beberapa permasalahan yang muncul tersebut, bisa saja terjadi karena masih kurangnya peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam membatasi penyebaran *hoax* di media sosial.

Kondisi seperti ini akan semakin bertambah buruk jika terus dibiarkan. Perlu adanya turun tangan pemerintah dalam menjalankan fungsi otonomi daerah untuk menjamin pembangunan sumberdaya manusia yang potensial bagi daerahnya. Hal tersebut menjadi latar belakang bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Dalam Membatasi Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Kabupaten Sumedang”**.

1.2 Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, untuk membatasi permasalahan yang diteliti, maka penulis memfokuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam membatasi penyebaran berita bohong (*hoax*) media sosial ?

2. Apa saja hambatan yang terdapat pada peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam membatasi penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan pada peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam membatasi penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam membatasi penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terdapat pada peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam membatasi penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pada peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam membatasi penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui pemberdayaan *team monitoring* di media sosial.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut.

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan, memperkaya teori dan literatur dalam pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan Peranan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Dalam Membatasi Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Kabupaten Sumedang.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil dari penelitian ini menjadi masukan sebagai bahan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan dapat menjadi masukan berharga bagi semua pihak yang terlibat langsung dalam Peranan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Dalam Membatasi Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Kabupaten Sumedang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hakekat Administrasi

2.1.1. Pengertian Administrasi

Menurut Anggara (2018: 25), Administrasi secara sempit berasal dari kata *administratie* (bahasa belanda), meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, pembuatan agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

Menurut Terry (Anggara, 2018: 25) “Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Siagian (2010: 9) memberikan definisi administrasi sebagai berikut: “Administrasi adalah seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.”

Akadun (2011: 18), memberikan definisi administrasi secara sempit yakni: “Secara sempit, Administrasi diartikan sebagai pekerjaan-pekerjaan klerikal atau ketatausahaan”.

Definisi lain menurut Fiffner (dalam Silalahi, 2007: 10) yang mengatakan bahwa:

Administration may be defined as the organization and direction of human and material resource to achive desired ends. (Administrasi dapat didefinisikan sebagai mengorganisasi dan menggerakkan sumber daya manusia dan materiil untuk mencapai tujuan yang diinginkan).

Dengan demikian, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Administrasi merupakan seluruh kegiatan yang mencakup segala bidang untuk memimpin suatu tujuan hingga menentukan tujuan yang akan dicapai sampai kepada penyelenggaraan mencapai tujuan.

2.1.2. Unsur-Unsur Administrasi

Ilmu administrasi terdiri dari beberapa unsur, yang dapat menggambarkan bahwa administrasi adalah ilmu yang luas dan kompleks. Menurut teori yang disampaikan oleh Silalahi (2007: 31), mengenai unsur-unsur/elemen ilmu administrasi, yaitu:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Kepemimpinan
4. Pengambilan Keputusan
5. Hubungan Antar Manusia/ Komunikasi

Gie (2009: 12) menyatakan bahwa unsur-unsur administrasi terdiri dari:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Tata usaha
8. Hubungan masyarakat

Kemudian, Mintorogo (2000: 75), mengemukakan unsur administrasi terdiri dari hal-hal berikut ini:

1. Organisasi.
2. Manajemen.
3. Komunikasi.
4. Kepegawaian
5. Perbekalan.
6. Keuangan.
7. Ketatausahaan
8. Hubungan masyarakat

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ruang lingkup administrasi negara adalah terdiri dari organisasi, manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan hubungan antar manusia.

2.1.3. Pengertian Administrasi Negara

Waldo (Iskandar, 2014: 18) meenjelaskan pengertian administrasi negara adalah:

Administrasi negara sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, administrasi negara merupakan suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Selanjutnya pengertian administrasi negara menurut Lembaga Administrasi Negara (2003: 5) adalah:

Berfokus pada fenomena penyelenggaraan negara atau organisasi dan manajemen negara yang berkenaan dengan keseluruhan unsur dan interaksi antar unsur negara (warga negara, wilayah negara, dan pemerintahan negara), tujuan bernegara, serta posisi dan peran negara dan warga negara (masyarakat) dalam keseluruhan aktivitas di dalamnya.

Menurut Litchfield (Anggara, 2018: 74) mengemukakan bahwa: “Administrasi negara adalah suatu studi mengenai cara bermacam-macam badan pemerintah diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin”.

Berdasarkan beberapa teori menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi negara merupakan suatu proses kerja sama yang berfokus pada kegiatan pemerintahan dalam menciptakan formulasi kebijakan publik yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat berlandaskan pada perundang-undang yang berlaku.

2.1.4. Ciri-Ciri Administrasi Negara

Administrasi negara mempunyai banyak definisi yang berbeda satu sama lain, sesuai dengan cakupan dan pusat perhatian. Sekalipun demikian, jika administrasi negara dibandingkan dengan organisasi sosial yang lain, maka segera terungkap bahwa administrasi negara mempunyai hal-hal yang bersifat khusus yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya.

Menurut Caiden (Revid dkk, 2020: 4) menyatakan ada 7 (tujuh) hal yang menjadi ciri administrasi publik:

1. Kehadiran administrasi negara tidak bisa dihindari.
2. Administrasi negara mengharapkan kepatuhan.
3. Administrasi negara mempunyai prioritas.
4. Administrasi negara mempunyai kekecualian.
5. Manajemen puncak administrasi negara adalah politik.
6. Penampilan administrasi negara sulit diukur.
7. Lebih banyak harapan yang diletakkan pada administrasi negara.

Di sisi lain Thoha (Revid dkk, 2020: 4-5) memberi batasan ciri-ciri administrasi negara sebagai berikut:

1. Pelayanan yang diberikan bersifat urgen (penting) jika dibandingkan dengan organisasi-oragnisasi swasta.
2. Pelayanan yang diberikan pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli.
3. Dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berarti mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
4. Pelayanan yang diberikan tidak dikendalikan oleh pasar.
5. Usaha-usaha yang dilakukan sangat tergantung pada penilaian rakyat.

Berdasarkan ciri-ciri administrasi negara diatas maka dapat disimpulkan, bahwa administrasi negara sangat berkaitan erat dengan lingkungan politik yang akan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Administrasi negara hadir guna menjalankan keputusan yang telah dihasilkan oleh kegiatan pemerintahan. Adminstrasi negara juga sebagai suatu keharusan dan tidak dapat dihindari serta

selalu dibutuhkan oleh manusia dalam semua bidang kehidupan manusia. Juga administrasi negara sangat erat hubungannya dengan kepentingan masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5. Ruang Lingkup Administrasi Negara

LAN RI (2003: 10) mengemukakan bahwa ditinjau dari segi unsurnya yang pokok dalam kehadirannya sebagai disiplin dan sebagai sistem lingkup perhatian administrasi tersebut meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

1. Tata nilai
2. Organisasi pemerintah negara
3. Manajemen pemerintah negara
4. Sumber daya aparatur negara
5. Sistem dan proses kebijakan
6. Posisi, kondisi dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara
7. Hukum administrasi negara

Shafritz dan Russel (1997: 77) menggambarkan bab-bab administrasi negara sebagai berikut:

1. Lingkungan politik dan budaya,
2. Penerapan reiveting government,
3. Hubungan antara lembaga pemerintahan,
4. Perkembangan teori manajemen dan organisasi,
5. Perilaku organisasi,
6. Manajerialisme dan kinerja,
7. Manajemen strategis di sektor publik,
8. Kepemimpinan dan akuntabilitas,
9. Manajemen personia dan hubungan kerja,
10. Keadilan sosial,
11. Manajemen keuangan,
12. Auditing, accounting, dan avaluasi,
13. Penghargaan dan etika.

Henry (2005: 27) memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas (selain perkembangan ilmu administrasi negara itu sendiri) antara lain:

1. Organisasi publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia.
3. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup administrasi negara adalah meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan erat dengan kebijakan publik, dan kepentingan masyarakat.

2.1.6. Kaitan Administrasi Negara Dengan Variabel Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan peran pemerintah. Bagaimana suatu organisasi berjalan sesuai perencanaan melalui kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah guna mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Istilah administrasi berasal dari bahasa latin yaitu "*administrare*" yang berarti dalam bahasa indonesianya membantu, melayani atau memenuhi. Adapun administrasi negara sebagaimana dikemukakan oleh Caiden (dalam Hamdani, 2007: 8), sebagai berikut:

Administrasi Negara adalah fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kerja sama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan rayat dan dana bagi program pemerintah, pemantapan dan juga perlu perubahan organisasi, pengarahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian, dan lain-lain fungsi yang dijadikan oleh lembaga eksekutif dan lembaga pemerintah lainnya.

Dari beberapa definisi diatas menunjukkan adanya kaitan yang erat antara administrasi negara dengan peran pemerintah sebagai pelaku pelayanan publik yang ditujukan untuk kepentingan publik. Hal ini selaras dengan pendapat

Soempono (Hamdani, 2007: 11), yang menyatakan bahwa administrasi negara sebagai berikut:

Walaupun administrasi negara diterjemahkan sebagai perwujudan perhatiannya pada kegiatan negara akan tetapi pelaksanaan administrasi negara itu ditujukan untuk kepentingan publik/masyarakat. Dengan demikian perhatian utama dari administrasi negara adalah kepentingan masyarakat.

Hal ini pun ikut ditegaskan oleh Leonald D. White yang menyatakan bahwa: besarnya administrasi negara dan luasnya kegiatannya tergantung pada harapan-harapan rakyat akan jasanya untuk menyelenggarakan atau melindungi kepentingan-kepentingan rakyatnya.

2.2 Hakekat Manajemen Publik

2.2.1 Pengertian Manajemen Publik

Soekanto (dalam Sukardi, 2013: 90) menyatakan bahwa “Manajemen publik adalah suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinir serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien”.

Manajemen menurut publik menurut Shafritz dan Russel (dalam Sukardi, 2013: 93) diartikan sebagai “upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi”.

Sedangkan menurut Ott, Hyde dan Shafritz (dalam Sukardi, 2013: 93) mengartikan “Manajemen publik adalah upaya untuk memfokuskan pada bagaimana organisasi publik mengimplementasikan kebijakan publik yang telah disepakati bersama”.

Hal ini senada dengan manajemen publik menurut Nor Ghofur (dalam Kebab, 2008: 93) yang mengartikan bahwa “manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan terhadap masyarakat”.

Dari beberapa definisi diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen publik adalah kegiatan menjalankan fungsi-fungsi manajemen secara efektif dan efisien untuk menjamin kepentingan masyarakat.

2.2.2 Konsep Manajemen Publik

Konsep manajemen publik dalam penelitian ini terbagi kedalam 3 paradigma, yaitu sebagai berikut:

a. Old Public Administration

Wilson dalam Thoha (2008:72-73) mengemukakan konsep pemerintahan dalam konsep *Old Public Administration* (yang kemudian dikenal dengan OPA)

“mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan yang pada pelaksanaannya dilaksanakan dengan netral, professional, dan lurus mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan”. Ada setidaknya dua tema kunci memahami OPA yang telah diletakkan. Pertama, ada perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. Perbedaan itu dikaitkan dengan akuntabilitas yang harus dijalankan oleh pejabat terpilih dan kompetensi yang netral dimiliki oleh administrator. Kedua, adanya perhatian untuk menciptakan struktur dan strategi pengelolaan administrasi yang memberikan hak organisasi publik dan

manajernya yang memungkinkan untuk menjalankan tugas-tugas secara efektif dan efisien.

Adapun konsep *Old Public Administration* adalah sebagai berikut:

- 1) Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang;
- 2) *public policy* dan *administration* berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik;
- 3) administrasi publik hanya memainkan peran yang lebih kecil dari proses pembuatan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik;
- 4) upaya memberikan pelayanan harus dilakukan oleh para administrator yang bertanggungjawab kepada pejabat politik dan yang diberikan diskresi terbatas untuk melaksanakan tugasnya;
- 5) para administrator bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis;
- 6) program-program kegiatan diadministrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan dikontrol oleh para pejabat dari hirarki atas organisasi;
- 7) nilai-nilai utama (*the primary values*) dari administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas;
- 8) administrasi publik dijalankan sangat efisien dan sangat tertutup, karena itu warga negara keterlibatannya amat terbatas;
- 9) peran dari administrasi publik dirumuskan secara luas.

b. New Public Management

Organisasi sektor publik sering divisualisasikan sebagai organisasi yang kaku, tidak inovatif, minim kualitas, dan beberapa kritikan lainnya hingga memunculkan sebuah gerakan reformasi di sektor publik yaitu dengan adanya konsep *New Public Management* (NPM). Menurut Mahmudi (2010:33-34) ditinjau dari perspektif historis, istilah "*New Public Management* pada awalnya dikenalkan di Eropa tahun 1980-an dan 1990-an sebagai reaksi terhadap tidak memadainya model administrasi publik tradisional Konsep OPA perlahan tergantikan dengan konsep NPM yang mampu menjawab adanya tuntutan

masyarakat yang semakin besar agar sektor publik dapat menghasilkan produk (barang/jasa) yang memiliki kualitas lebih baik atau minimal sama dengan yang dihasilkan sektor swasta”.

Diungkapkan oleh Islamy (2003: 55-56) bahwa paradigma manajemen publik mengkritisi nilai-nilai administrasi publik yang dianggap fundamental dengan menegaskan beberapa hal, yaitu:

- 1) Birokrasi bukanlah satu-satunya penyedia (*provider*) atas barang dan jasa publik karena sesuai dengan prinsip *generic management* yang fleksibel, sektor swasta telah lama menjadi pionir dalam menyediakan juga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat;
- 2) Sistem manajemen swasta yang fleksibel itu bisa diterapkan atau diadopsi oleh sektor publik;
- 3) Peran ganda sektor publik di bidang politik dan administrasi yang telah lama terjadi bisa lebih terwujud di dalam paradigma baru, manajemen publik;
- 4) Akuntabilitas publik dapat diwujudkan secara lebih nyata.

c. New Public Service

Periode ketiga dalam perkembangan manajemen publik yaitu periode *New Public Service* atau NPS. Berbeda dengan konsep model klasik dan NPM, konsep NPS adalah konsep yang menekankan berbagai elemen. Walaupun demikian NPS mempunyai normatif model yang dapat dibedakan dengan konsep-konsep lainnya. Thoha (2008: 84) menyatakan bahwa “Ide dasar dari NPS dibangun dari konsep-konsep; (1) teori *democratic citizenship*; (2) model komunitas dan *civil society*; (3) organisasi *humanism*; (4) *postmodern* ilmu administrasi publik”. Pemahaman mengenai manajemen dalam sektor publik merupakan adopsi dari unsur-unsur manajemen pada sektor swasta. Oleh karena itu, senada diungkapkan oleh Mahmudi (2010: 36) organisasi sektor publik perlu mengadopsi prinsip-prinsip sektor swasta.

Dari paradigma-paradigma di atas, telah dikemukakan perubahan konsep manajemen publik di masing-masing periode. Pada hakikatnya menurut Islamy (2003: 56) manajemen publik memiliki karakter antara lain:

1. Manajemen publik merupakan bagian yang sangat penting dari administrasi publik (yang merupakan bidang kajian yang lebih luas), karena administrasi publik tidak membatasi dirinya hanya pada pelaksanaan manajemen pemerintahan saja tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural, dan hukum yang berpengaruh pada lembaga-lembaga publik;
2. Manajemen publik berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sektor publik (pemerintahan), maupun sektor diluar pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung (*nonprofit sector*);
3. Manajemen publik memfokuskan atau mengarahkan administrasi publik sebagai suatu profesi dan manajernya sebagai praktisi dari profesi tersebut;
4. Manajemen publik berkaitan dengan kegiatan internal (*internal operations*) dari organisasi pemerintahan maupun sektor non pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung;
5. Manajemen publik secara spesifik menyuarakan tentang bagaimanakah organisasi (*organizational how to*) publik melaksanakan kebijakan publik;
6. Manajemen publik memanfaatkan fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan publik, maka berarti memfokuskan diri pada *the managerial tools, techniques, knowledges and skills* yang dipakai untuk mengubah kebijakan menjadi pelaksanaan program.

2.2.3 Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari Bahasa Yunani, Sansakerta dan Latin. Akar kata dalam Bahasa Yunani dan Sansakerta yaitu *polis* (negara kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi

politia (negara) dan akhirnya dalam Bahasa Inggris *policie*, yang artinya menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan perundang-undangan yang lain, mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh anggota masyarakat. Dengan demikian sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan dan dilaksanakan oleh badan atau lembaga yang berwenang.

Kebijakan dapat dipahami dari beberapa pendapat ahli, hal tersebut dimaksudkan dalam rangka memberikan pemahaman yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Jenkins (dalam Wahab, 1997: 14) mengemukakan bahwa:

Kebijakan adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seseorang aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapai dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Kebijakan Pemerintah harus senantiasa ditunjukan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Dalam hal ini Islamy (2003: 20-21) menegaskan bahwa “Kebijakan Pemerintah merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat”.

Hal ini menimbulkan pengertian sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan itu dalam bentuk pertamanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
2. Bahwa kebijaksanaan itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata;
3. Bahwa kebijakan itu baik untuk, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan;

4. Bahwa kebijakan itu harus senantiasa ditunjukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Sedangkan menurut pendapat Hoogerwerf (1999: 3-4) definisi kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan dapat dilukiskan sebagai suatu usaha untuk mencapai sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Kebijakan adalah jawaban terhadap suatu masalah. Kebijakan adalah suatu upaya untuk memecahkan masalah, mengurangi atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah.

Pendapat dari Hoogerwerf menegaskan bahwa kebijakan merupakan suatu jawaban terhadap masalah dalam upaya mencegah, mengurangi atau memecahkan masalah tersebut dengan tindakan yang terarah dan dalam urutan waktu tertentu.

b. Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan Pemerintah harus senantiasa ditunjukan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Dalam hal ini Islamy (2003: 20-21) menegaskan bahwa "Kebijakan Pemerintah merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat".

Pemerintah dalam suatu kebijakan mempunyai tujuan-tujuan penting, seperti dikemukakan oleh Hoogerwerf (1999: 9) yaitu:

1. Memelihara ketertiban umum (disini negara berfungsi sebagai stabilisator);
2. Meningkatkan dan mempelancar kemajuan masyarakat (disini negara berfungsi sebagai stimulator);
3. Memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelaraskan berbagai aktivitas (disini negara berfungsi sebagai koordinator);
4. Membagi berbagai materi (disini negara berfungsi sebagai alokator).

Kebijakan merupakan suatu taktik dan strategi yang digunakan dan diarahkan untuk mencapai yang diinginkan. Lebih lanjut (dalam Islamy, 2000: 17) mengemukakan bahwa “Kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang digunakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan”. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen, yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
2. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik dan strategi.

2.3.1. Peran Pemerintah dalam Membatasi Penyebaran *Hoax*

2.3.2. Pengertian Peran Pemerintah

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto dalam Soekanto, 2009: 214).

Teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono dalam Soekanto, 2009: 214)

Peran menurut Soekanto (2009: 212-213)

“Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya”.

Sedangkan menurut Merton (dalam Islamy 2003 : 67) mengatakan bahwa:

“Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus”.

Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard (dalam Islamy 2003: 55) memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi bahwa “peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”.

Peran pemerintah adalah sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan tugas dan fungsi pemerintah sebagai pelayan publik, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang pemerintah.

2.3.3. Dimensi Peran Pemerintah

Menurut Aini (dalam Fathoni, 2016: 133) menyebutkan peran dan fungsi pemerintahan sebagai berikut:

1. Pengaturan
2. Pelayanan
3. Pemberdayaan

Untuk lebih jelasnya, maka dapat di lihat pada uraian berikut ini:

1. Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang,

peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Hal ini di kemukakan oleh Manan (2012: 18), bahwa “peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum”.

Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi dalam Ranggawidjaja (1998: 19) “peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi”.

Menurut Soeprapto (2006: 3), istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah;

Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan. Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut Pemerintah Daerah berperan sebagai pembuat kebijakan.

2. Pelayanan

Menurut Sampara dalam Sinambela (2011: 5) pelayanan adalah “suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan”.

Kotler dalam Sinambela (2011: 243) mengemukakan bahwa “pelayanan sebagai kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada kesatuan produk secara fisik”.

Selanjutnya (Munir 2005: 47) juga mengatakan pelayanan umum adalah “kegiatan yang oleh seseorang (sekelompok orang) dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lainya sesuai dengan haknya”. Munir mengemukakan bahwa “pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya”. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan kepada pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan.

Dari definisi beberapa ahli diatas, menunjukan bahwa pelayanan adalah upaya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara (aparatur) dalam bentuk barang dan jasa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sulistio (2009: 44) mendefinisikan tiga aspek pelayanan prima yaitu:

- a. Kemampuan profesional.
- b. Kemauan yang teguh sikap yang ikhlas, tulus senang membantu menyelesaikan keluhan.
- c. Kemampuan yang profesional, tercermin dalam pemikirannya yang berlainan, perencanaan yang tepat, kerja yang berkualitas, sentuhan yang menyenangkan.

3. Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan dijelaskan oleh Agustino (2007: 197) bahwa “Secara teoritik merupakan sebuah (konsep) gerakan perlawanan pembangunan alternatif terhadap hegemoni konsep pembangunan developmentalisme, tepatnya modernisasi”.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Pranarka dikutip Sedarmayanti (2017: 60) mengutarakan bahwa “Konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa dengan aliran-aliran pada paruh kedua abad ke 20, yang dewasa ini banyak dikenal sebagai aliran post modernisme, dengan titik berat sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti sistem, anti struktur dan anti determinisme, yang diaplikasikan kepada dunia kekuasaan”.

Lebih lanjut Paul dalam Sedarmayanti (2017: 60) menyatakan pula bahwa “Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil-hasil pembangunan”.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005: 18) ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

2.3.4. Faktor-Faktor Penghambat Peran Pemerintah

Dalam perannya sebagai pembuat kebijakan, pemerintah memiliki resiko yang besar apabila semua rencananya tidak dapat terealisasi dengan baik karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses perencanaan tersebut.

Dilihat dari perspektif Aini (dalam Fathoni, 2016: 133), faktor-faktor yang dapat menghambat peran dan fungsi pemerintahan dapat dilihat dari tiga hal berikut:

1. Pengaturan
2. Pelayanan
3. Pemberdayaan

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menjelaskan sebagai berikut:

1. Pengaturan

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang. Peneliti menemukan indikasi masalah yang menjadi hambatan bagi pemerintah dalam bidang pengaturan untuk membatasi penyebaran *hoax* di Kabupaten Sumedang, salah satunya tidak ada ketegasan sehingga menjadikan regulasi yang tidak tepat sasaran.

Pemerintah membuat suatu kebijakan tentang pengaturan karena adanya tekanan-tekanan dari luar. Walaupun ada pendekatan pembuatan pengaturan yang “*rational comprehensive*” yang berarti pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata, tetapi proses dan prosedur pembuatan pengaturan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan pengaturan ini.

2. Pelayanan

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang. Peneliti menemukan indikasi masalah yang menjadi hambatan bagi pemerintah dalam bidang pelayanan untuk membatasi penyebaran *hoax* di Kabupaten Sumedang, salah satunya informasi yang kurang terjangkau untuk seluruh masyarakat di Kabupaten sumedang.

Saat ini, pelayanan publik dihadapkan pada perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, pemerintah dituntut siap untuk menanggapi harapan masyarakat dan tantangan global yang dipicu oleh perubahan dan kemajuan terutama di bidang teknologi. Dunia telah berubah dimana aktivitas dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital.

Masyarakat semakin lama semakin smart dan semakin *well informed* sehingga masyarakat memiliki kecenderungan “menuntut lebih” atas layanan

publik yang diterima atau dirasakannya. Selain itu, saat ini perubahan berjalan dengan begitu cepat dan bertubi-tubi sehingga layanan yang dulu dibanggakan bisa jadi sekarang sudah dianggap usang atau sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu, peran pemerintah melalui bidang pelayanan menjadi tantangan tersendiri agar tujuan menjadikan masyarakat sejahtera dapat terwujud dalam segala kondisi.

3. Pemberdayaan

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang. Peneliti menemukan indikasi masalah yang menjadi hambatan bagi pemerintah dalam bidang pemberdayaan untuk membatasi penyebaran *hoax* di Kabupaten Sumedang, salah satunya pembinaan pegawai yang masih harus dilakukan guna menjadikan SDM yang siap untuk digitalisasi.

Tujuan organisasi akan sulit dicapai bila karyawan tidak mau menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk bekerja semaksimal mungkin. Oleh karena itu, tugas pimpinan atau organisasi yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan adalah bagaimana agar para karyawan tersebut tetap bergairah dalam bekerja dan selalu mempunyai perilaku positif dalam melakukan tugas-tugasnya. Terlebih dalam menjalankan perannya sebagai pembuat suatu kebijakan, pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas di dalamnya. Ketidak inginan untuk berkembang, atau terperangkap pada zona nyaman, menjadikan pemberdayaan pegawai harus dilakukan dalam setiap lapisan

birokrasi agar pemerintah dapat menjalankan perannya sebagai pembuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat.

2.3.5. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Peran Pemerintah

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut diatas, maka upaya untuk mengatasi peran pemerintah, mengacu pada teori menurut menurut Aini (dalam Fathoni, 2016: 133) sebagaimana tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan
2. Pelayanan
3. Pemberdayaan

Adapun penjelasannya dari setiap dimensi upaya-upaya mengatasi hambatan peran pemerintah dalam menangani keluhan pelanggan adalah sebagai berikut:

1. pengaturan

Maksud dari fungsi ini adalah upaya pemerintah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan. Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaanannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut Pemerintah Daerah berperan sebagai pembuat kebijakan

2. Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan layanan publik dengan memadukan perubahan yang sedang terjadi, maka paling tidak terdapat 4 (empat) hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka kaji ulang atas pemberian layanan publik di era digital ini, yaitu:

- a. Melakukan identifikasi kembali proses bisnis yang relevan dengan tujuan utama pemerintah;
- b. Mengupayakan layanan yang diberikan kepada masyarakat real time/instant dan diinformasikan kepada masyarakat (kejelasan dan kepastian layanan)
- c. Mengembangkan perangkat digital yang mendukung mobilitas pegawai sehingga mempermudah semua aktifitas dan kolaborasi antar pegawai dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. Mengembangkan/modifikasi proses bisnis sebagai respon atas perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat di era digital.

Berkembangnya teknologi selalu membuat masyarakat terkoneksi satu dengan lain dengan mudah dan diharapkan layanan publik dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Namun demikian, layanan *offline* di kantor tidak serta merta ditinggalkan dan harus diintegrasikan antara layanan *online* dan *offline*. Karena itu, sudah tidak relevan lagi memandang masyarakat sebagai obyek layanan dengan proses yang berbelit-belit. Negara harus lebih dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan kenyamanan dan merangsang masyarakat lebih inovatif, kreatif, produktif serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

3. Pemberdayaan

Terkait dengan upaya pemberdayaan karyawan di atas berupa menanamkan visi bersama, dapat dikemukakan mengenai keberhasilan dan pastikanlah bahwa karyawan memahami mengapa itu penting dan apa sasaran-

sasarannya. Adanya visi yang sama, sehingga seluruh karyawan mengetahui secara tepat ke mana organisasi ini akan melangkah. Dengan memahami tujuan organisasi, maka sarana untuk mencapai tujuan dapat diserahkan kepada masing-masing karyawan, asalkan tolok ukurnya jelas dan pasti. Dengan begitu, para karyawan akan mampu membuat keputusan-keputusan yang terbaik dan mengambil risiko-risiko yang telah diperhitungkan sendiri berdasarkan pemahamannya atas tugas dan fungsinya sebagai karyawan.

Selanjutnya kepada karyawan perlu diberikan pendidikan yang lebih bersifat filosofis dan teoritis, dengan tujuan sebagai pembelajaran. Dalam pembelajaran tersebut terdapat pemahaman secara implicit, dan melalaui pemahaman maka karyawan dimungkinkan untuk menjadi seorang innovator, pengambil inisiatif, pemecah masalah yang kreatif, dan menjadi karyawan yang efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan.

Oleh karena itu, kepada setiap individu karyawan (*individual learning*), kelompok kerja (*learning team*), organisasi (*learning organization*) serta masyarakat (*society learning*) dituntut untuk senantiasa belajar guna menjadi bangsa yang cerdas dan bermartabat dalam rangka mencapai kejayaan individu, masyarakat, organisasi, bangsa dan negara.

2.3.6 Penyebaran Berita Hoax

Dalam *Oxford English Dictionary*, *hoax* adalah sebagai (*malicious deception*) atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat.

Situs hoaxes.org dalam suatu konteks budaya mengarahkan bahwa “hoax merupakan suatu aktivitas menipu. Apabila koran sengaja mencetak dan memuat

cerita dan berita palsu, tidak jauh berbeda dengan *facebook* apabila konten yang disebar itu palsu dapat kita sebut *hoax*.”

Menurut Septiaji Eko N. (2017 : 23) mengemukakan pendapatnya bahwa berita *hoax* merupakan :

”Informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Hoaks didefinisikan sebagai upaya memutar balikkan fakta, menggunakan informasi yang meyakinkan, tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Selain itu, hoaks juga hendak mengaburkan informasi yang sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi pesan yang benar.”

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penyebaran berita *hoax* merupakan suatu tindakan yang berupaya untuk mendapatkan keuntungan tertentu melalui manipulasi berita atau konten dalam media sosial secara disadari.

2.4. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti terlebih dahulu menggunakan penelitian terdahulu yang berupa skripsi dan jurnal sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, hal ini untuk mempermudah peneliti menyusun dan mempertimbangkan penyusunan skripsi.

Berikut adalah hasil-hasil peneliti terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL
1.	Santi Nuraini (STIA Sebelas April Sumedang tahun 2020) Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pembinaan Gabungan Kelompok Tani Ubi Cileumbu di Desa Cileumbu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang	1. Variabel yang di teliti adalah Peran Pemerintah, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, Analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman	1. Lokus penelitiannya dilakukan di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. 2. Fokus permasalahan peran pemerintah kecamatan dalam membina gabungan kelompok tani	Hasil dari penelitian ini menunjukkan belum adanya pengaturan tentang penetapan Harga Standar Jual (harga ecer) Ubi Cileumbu yang tentu dapat merugikan masyarakat petani, meskipun Ubi Cileumbu sudah memiliki Indikasi Geografis, tetapi itu belum dapat menjamin kestabilan harga jualnya. Sehingga perlu adanya suatu regulasi untuk menyelamatkan ekonomi kelompok tani.
2.	Fickyana Setyarahitih (2013) Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Museum (Studi Kasus Museum Sonobudoyo Yogyakarta).	1. Variabel yang di teliti adalah Peran Pemerintah, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif Metode Penelitian Kualitatif	1. Lokus penelitian dan alat ukur yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori Messi, dkk.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengembangkan potensi wisata museum adalah Penyediaan fasilitas wisata museum dan kerjasama dengan para stakeholder.
3.	Budi Mansyah (2017) Fenomena Berita Hoaks Sosial Media Facebook Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta	1. Metode penelitian kualitatif 2. Fokus permasalahan pada penyebaran berita <i>hoax</i>	1. Lokasi penelitian dan variable penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, para pengguna facebook memaknai berita hoaks media sosial menjelang pemilu DKI Jakarta meresahkan dan harus segera ditindak oleh pemerintah. Palsanya dalam konteks kekuasaan, penyebaran berita hoaks ditujukan untuk memengaruhi orang.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian yang telah diuraikan di atas, dimana penelitian ini meneliti tentang fenomena berita hoaks yang berfokus pada peran pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik dalam membatasi Penyebaran berita *hoax* di Kabupaten Sumedang. Sehingga penelitian ini layak untuk diteliti karena akan berfokus pada apa saja yang menjadi faktor penghambat dan upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam membatasi penyebaran berita *hoax* di Kabupaten Sumedang.

2.5 Kerangka Pemikiran dan Kisi-kisi Pertanyaan Penelitian

2.5.1 Kerangka Pemikiran

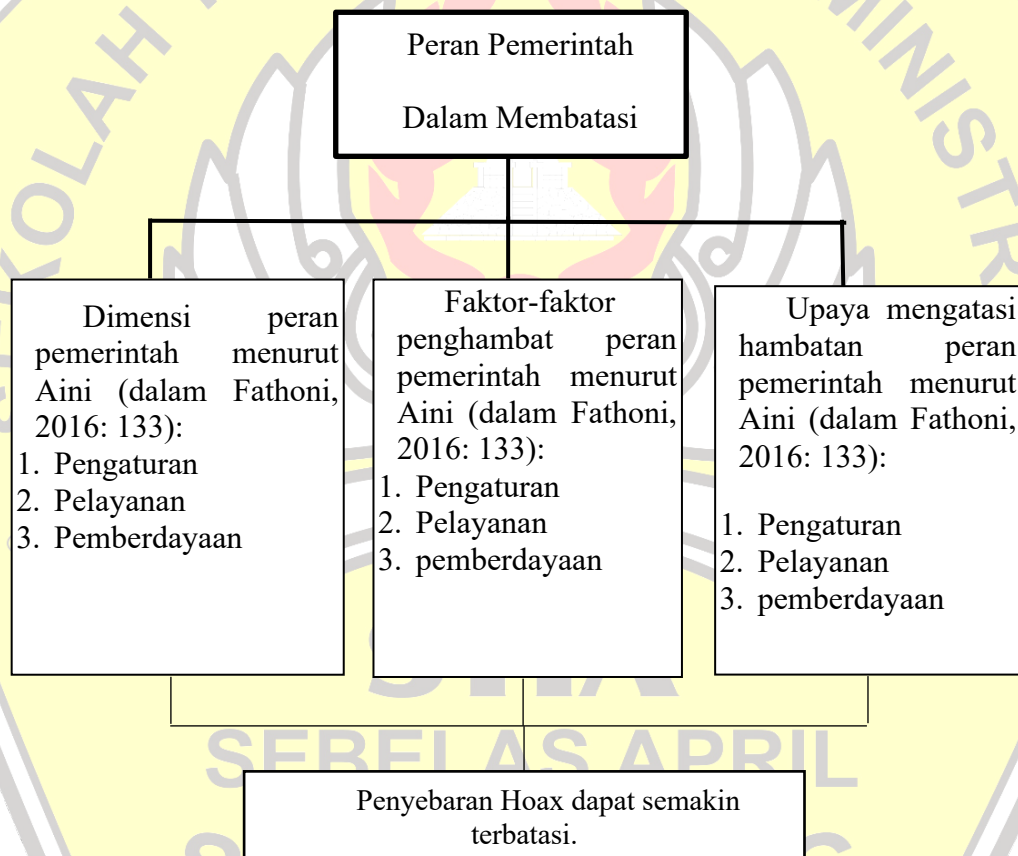
Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002: 31).

Dalam menjalankan perannya sebagai pemerintah yaitu dengan memperhatikan fungsi-fungsi pemerintahan menurut Aini (dalam Fathoni, 2016: 133), yang selanjutnya menjadi fokus dalam penelitian, meliputi:

1. Fungsi Pengaturan,
2. Fungsi Pengaturan,
3. Fungsi Pemberdayaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, berikut gambaran alur berfikir Mengenai Peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Dalam Membatasi Penyebaran Berita *Hoax* di Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

2.5.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Pernyataan penelitian mengenai strategi komunikasi disajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kisi-kisi Pertanyaan Penelitian

Fokus Penelitian	Fokus Teori	Indikator	No Item
Peran Pemerintah Menurut Aini (Fathoni, 2009:133)	Peran Pemerintah di Bidang Pengaturan	1. Pelaksanaan kebijakan	1
		2. Ketegasan hukuman bagi pelaku penyebar <i>hoax</i>	2
		3. Sosialisasi dari pemerintah	3
	Peran Pemerintah di Bidang Pelayanan	1. Membentuk <i>team monitirong</i>	4
		2. Menyediakan layanan informasi yang aktual	5
	Peran Pemerintah di Bidang Pemberdayaan	1. Fasilitas yang memadai	6
		2. pengembangan transformasi digital	7
		3. SDM yang siap dengan digitalisasi	8
Hambatan Peran Pemerintah menurut Aini (Fathoni, 2009:133)	Hambatan Peran Pemerintah di Bidang Pengaturan	1. Regulasi tidak tepat waktu	9
		2. Memunculkan polemik baru	10
		3. Kebijakan yang tidak tepat sasaran	11
	Hambatan Peran Pemerintah di Bidang Pelayanan	1. <i>Server Maintance</i>	12
		2. Tidak terjangkau seluruh masyarakat	13
		3. Kurangnya sosialisasi	14
	Hambatan Peran Pemerintah di Bidang Pemberdayaan	1. Kurangnya pengawasan oleh atasan	15
		2. Belum adanya Pembinaan Kepegawaian	16
		3. kurang maksimalnya potensi pegawai	17
Upaya Mengatasi Hambatan Peran Pemerintah Menurut Aini (Fathoni, 2009:133)	Upaya Mengatasi Hambatan Peran Pemerintah di Bidang Pengaturan	1. Regulasi yang tepat waktu	18
		2. Mudah dipahami lapisan masyarakat.	19
		3. Ketegasan hukuman bagi pelanggar	20
	Upaya Mengatasi Hambatan Peran Pemerintah di Bidang Pelayanan	1. Dilakukan oleh profesional	21
		2. Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat	22
		3. Mengadakan seminar khusus bagi masyarakat	23
	Upaya Mengatasi Hambatan Peran Pemerintah di Bidang Pemberdayaan	1. memperkuat pengawasan oleh atasan	24
		3. Mengadakan Bimtek bagi pegawai	25
		4. Mengadakan seleksi pegawai	26

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Hadi, 2011: 4).. Sedangkan Menurut Sugiyono (2016: 2) mengemukakan bahwa, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Adapun metode kualitatif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017: 9), adalah:

Penelitian berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif menurut Bodgan and Biklen (Sugiyono, 2017: 13) memiliki sejumlah karakteristik tertentu. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. *Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and researcher is the key instrument.* (dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci).
2. *Qualitative research is descriptive. The data collected is in the form of words of pictures rather than number.* (penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka).
3. *Qualitative research are concerned with process rather than simply with outcomes of product.* (penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome).
4. *Qualitative research tend to analyze their data inductively.* (penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif).
5. *"Meaning" is of essential to the qualitative approach.* (penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati)).

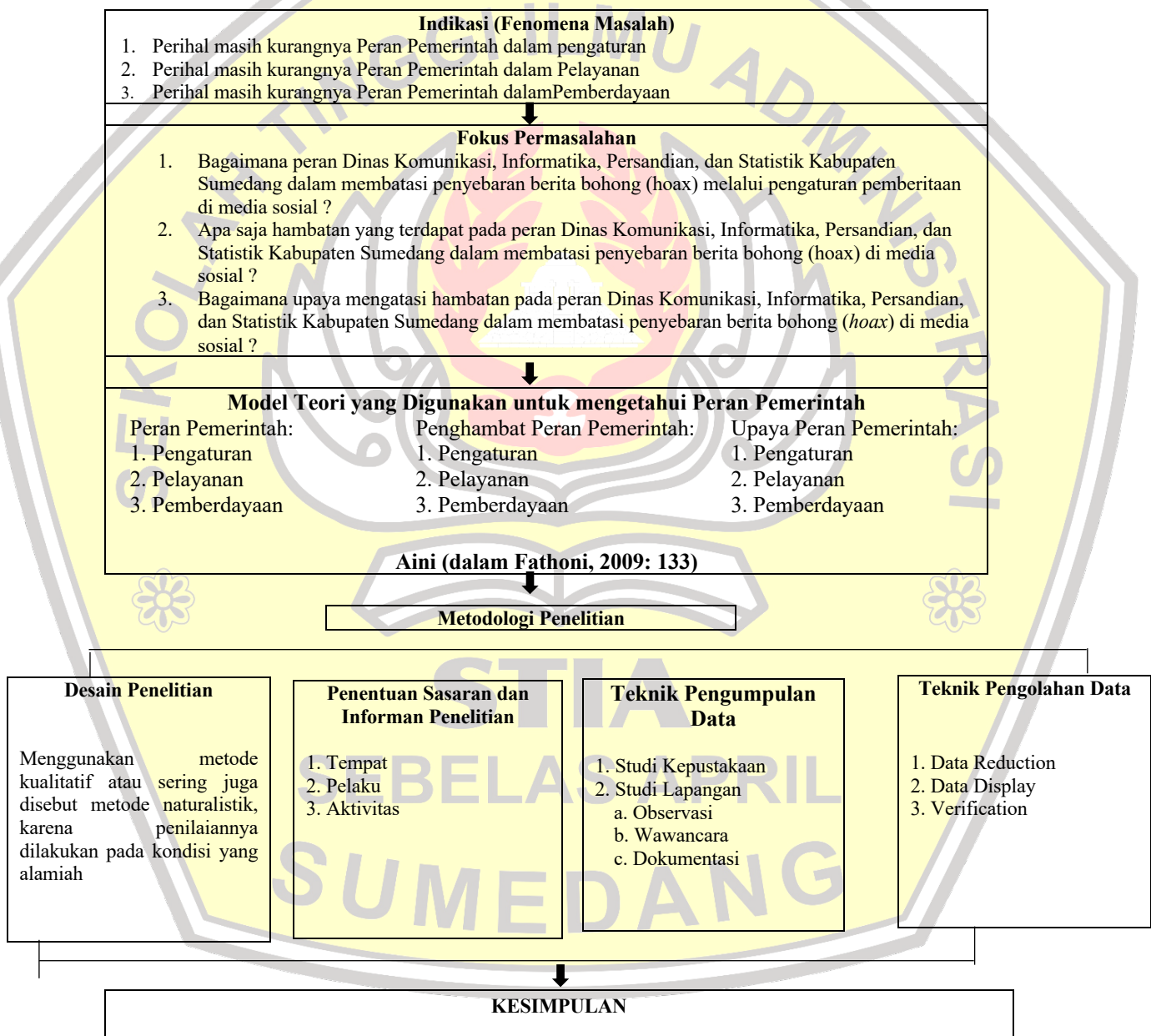
Penelitian kualitatif menurut Moleong (2014: 8-13), memiliki sejumlah karakteristik tertentu. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Latar alamiah
 2. Manusia sebagai alat (instrumen)
 3. Metode kualitatif
 4. Analisis dan secara induktif
 5. Teori dan dasar
 6. Deskriptif
 7. Lebih mementingkan proses daripada hasil
 8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus
 9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
 10. Desain yang bersifat sementara
- Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Berdasarkan pendapat tersebut maka penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan penelitian ilmiah.

Dengan digunakan metode kualitatif maka diharapkan data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, sehingga dapat memiliki kredibilitas yang tinggi dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan desain penelitian di bawah ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 3.1
Desain Penelitian

3.2 Penentuan Sasaran, Informan dan Narasumber Penelitian

3.2.1 Penentuan sasaran

Dalam melaksanakan penelitian, setiap kegiatan pengumpulan data selalu berhadapan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa manusia, benda ataupun aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian dimana suatu masalah dapat untuk keseluruhan karakteristik objek, penelitian ini disebut objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tapi oleh spardey yang dikutip Sugiyono (2017: 215), dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Sasaran dalam penelitian ini yaitu para pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran penelitian

No.	Sasaran	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretariat	17
3.	Bidang komunikasi	6
4.	Bidang informatika	5
5.	Bidang Persandian	5
6.	Bidang Statistik	6
7.	UPT LPSE	2
	Jumlah	41

Sumber: Daftar Pegawai Diskominfo Sanditik Kabupaten Sumedang 2021

3.2.2. Informan Penelitian

Bungin (2008: 76), mengemukakan bahwa: “informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian”.

Sedangkan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Purposive Sampling*, menurut Sugiyono (2017: 216) mengatakan bahwa, Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya yang menjadi informan disini adalah pegawai-pegawai yang dianggap memiliki otoritas dan dapat memberikan argument bahwa mereka mengetahui banyak mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Yang menjadi informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No.	Unsur	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Bidang Informatika	1
2.	Kepala Seksi Telekomunikasi	1
3.	Staff Bagian Program	1
Jumlah		3

Sumber: Hasil penelitian, 2021

3.3. Teknik pengumpulan data

Untuk menunjang metode yang digunakan guna memperoleh informasi dalam penelitian ini, maka dari itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016: 224-241), sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data sekunder, melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur, buku-buku ilmiah,

peraturan-peraturan yang berlaku, laporan-laporan, arsip-arsip, dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang dapat menunjang kelancaran pencairan data.

2. Teknik pengumpulan data primer, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dilapangan, dengan cara:
 - a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk mencatat segala kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dimana peneliti tidak ikut terlibat dalam proses kerja.
 - b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meminta penjelasan kepada berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, mendalam serta terarah sesuai dengan pedoman wawancara.
 - c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data berupa rekaman hasil wawancara, foto-foto, catatan harian lapangan yang merupakan pelengkap hasil wawancara dengan observasi.

3.4. Prosedur Pengolahan Data

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu kepada teknik analisis data Model Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2017: 247-252), yaitu sebagai berikut:

1. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data display* (penyajian data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Sugiyono berpendapat bahwa yang sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, tabel dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh penelitian sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan.

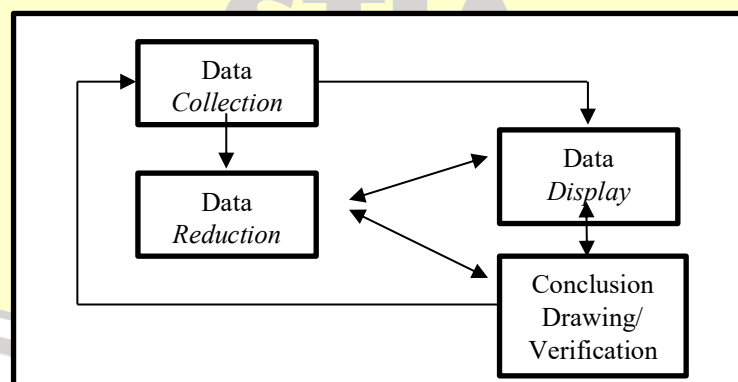
3. *Conclusion drawing atau verification*

Yaitu penarikan kesimpulan data dan verifikasi. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang berupa deskripsi atau gambaran dari objek penelitian dan didukung oleh data-data yang akurat. Kesimpulan ini pada akhirnya dapat dijadikan hipotesis penelitian,

4. Triangulasi

Merupakan teknik pengolahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka analisis data tersebut diatas oleh Sugiyono (2017:247) sebagai berikut:



Gambar 3.2: komponen dalam analisis data

Sumber: Sugiyono, 2017: 247

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Dalam Membatasi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang dengan jadwal penelitian pada tabel berikut:

[illegible]

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Peran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Dan Statistik Dalam Membatasi Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) di Kabupaten Sumedang”, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah untuk membatasi penyebaran *hoax* sudah mulai dipersiapkan dengan beberapa kebijakan dan pengembangan pegawai untuk bisa beradaptasi dengan era digital saat ini, sehingga mampu memanfaatkan berbagai macam *platform* media sosial untuk mengawasi setiap informasi yang tersebar di masyarakat dan memberikan pelayanan informasi terbuka kepada masyarakat. Namun, dalam pelayanan informasi kepada masyarakat masih belum terlaksana dengan baik karena masih belum bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah kabupaten Sumedang. Hal ini berdampak pada masih terdapatnya beberapa informasi keliru yang disebar luaskan oleh masyarakat tanpa adanya wadah untuk masyarakat mencoba mendapatkan klarifikasi langsung dari pemerintah kabupaten Sumedang.
2. Faktor-faktor penghambat peran pemerintah dalam membatasi penyebaran *hoax* adalah kurang terjangkaunya informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, baik informasi mengenai kegiatan pemerintahan, edukasi tentang berbagai aturan baru, informasi tentang bahayanya sebuah

informasi palsu yang akan menyebabkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Tidak terjangkaunya suatu informasi oleh masyarakat, bisa terjadi karena kurang maksimalnya pelayanan informasi yang diberikan oleh pemerintah, dan juga karena beberapa masyarakat belum mendapatkan pelayanan berupa akses yang mudah untuk mendapatkan informasi langsung dari pemerintah, sehingga masyarakat lebih banyak menyerap setiap informasi dari berbagai sumber tanpa mengetahui kejelasannya.

3. Upaya-upaya mengatasi hambatan peran pemerintah dalam membatasi penyebaran berita palsu (*hoax*) yaitu dengan meningkatkan pelayanan informasi terbuka kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan harus dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami setiap masyarakat. masyarakat tidak kebingungan dalam menyerapnya dan tidak akan adanya kesalahpahaman yang berakibat pada keresahan di masyarakat. Selain itu, pelayanan informasi berbasis teknologi melalui akun-akun media sosial, juga sangat penting dilakukan agar menarik perhatian masyarakat muda untuk ikut menyebarkan informasi-informasi kepada masyarakat lainnya. Juga, pemberdayaan pegawai melalui pembentukan *team monitoring* salah satunya sangat penting dilakukan guna mengawasi kegiatan bersosial media masyarakat yang menyebarkan informasi-informasi tanpa sumber yang pasti agar segera mendapat klarifikasi dari pemerintah yang berkehendak. Dengan begitu, upaya dalam membatasi penyebaran berita palsu (*hoax*) ini dapat berjalan secara maksimal.

5.2 Saran

1. Ketegasan dalam membuat aturan dan pengawasan harus segera dijalankan dan ditetapkan oleh pemerintah, yang kemudian di sampaikan kepada masyarakat secara konsisten dan terstruktur.
2. Pelayanan dalam memberikan informasi secara transparan harus ditingkatkan kembali melalui pemanfaatan media sosial yang memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya.
3. Pegawai harus mendapatkan pelatihan berupa bimbingan teknologi agar selalu siap dengan adanya transformasi digital yang akan mempermudah kinerja pemerintah. Dengan begitu, setiap fasilitas yang dimiliki Diskominfo Sanditik Kabupaten Sumedang dapat digunakan untuk menunjang setiap pekerjaan secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abdurrahmat Fathoni, 2009. *Organisasi&Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: CV Rineka Cipta.
- Akadun. 2011. *Teknologi Informasi Admnistrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2018. *Ekologi Administrasi Holistik, Kontemporer, dan Konstektual*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Aribowo Sasmito. 2020. “Gerakan Anti Hoax Di Media Sosial” Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). 19 November 2020. <https://www.mafindo.or.id/2020/11/19/topik-teratas-periksa-fakta-mafindo-periode-1-16-november-2020/>
- Bungin, H.M. Burhan. 2008. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: kencana.
- Hasibuan, Malayu.S.P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermayanty, I. ., & Yuliyanti. (2020). PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(2), 24-35. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/50>
- Hilman Kamaludin. 2021. “Pria di Sumedang Tikam Temannya Hingga Tewas Gara-gara Permintaan Maaf Tak Diterima”. *Tribun News Jawa Barat*. 29 Januari 2021. <https://www.tribunnews.com/regional/2021/01/29/pria-di-sumedang-tikam-temannya-hingga-tewas-gara-gara-permintaan-maaf-tak-diterima>
- Iskandar, Jusman. 2014. *Kapita Selekta Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik*. Bandung: Puspaga.
- LAN RI. 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Moleong, Lexy, J. 2014. *Metedologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Revida, Erika dkk. 2020. *Teori administrasi publik*. Medan: Yayasan kita menulis.

Septiaji Eko. 2017. *Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa*.

Yogyakarta: Trusmedia Publishing.

Siagian, Sondang P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Silalahi, U. 2011. *Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: CV Sinar Baru.

_____. 2007. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

_____. 2011. *Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori, Dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

STIA Sebelas April Sumedang. 2021. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Sumedang: STIA Sebelas April Sumedang.

Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.

_____. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : CV. Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana.

_____. 2011. *Aspek-Aspek Pokok Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.



STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG